



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASER

LAPORAN EVALUASI RENJA TRIWULAN II

TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulan II Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Laporan Evaluasi Renja Triwulan II ini merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban kepada Pedoman Evaluasi Rencana Kerja dan mandat untuk menjalankan kegiatan dan penggunaan anggaran. Keberhasilan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana dituangkan dalam dokumen ini, merupakan wujud kerja keras seluruh aparatur pemerintah daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser termasuk peran serta Non ASN yang telah memberikan sumbangsihnya untuk kemajuan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Paser pada umumnya.

Demikian Laporan Evaluasi Renja Triwulan II Sekretariat Daerah Tahun 2026 ini disusun sebagai instrument dalam pengukuran capaian kinerja Perangkat Daerah. Diharapkan selain evaluasi hasil pelaksanaan Renja dapat dipergunakan untuk bahan evaluasi dan tolak ukur penilaian kinerja pada unit kerja pelaksana kegiatan, evaluasi hasil akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Renja periode mendatang semoga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja guna perbaikan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

Tana Paser, Juli 2026
Sekretaris Daerah,



Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19661211 198609 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Maksud dan Tujuan Laporan	
A.1. Maksud Laporan	4
A.2. Tujuan Laporan	4
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	4
C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8
D. Isu Strategis	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II : CAPAIAN TARGET PENYERAPAN ANGGARAN KEGIATAN	
A. Anggaran Belanja Kegiatan	11
B. Realisasi anggaran	12
BAB III : EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA SETDA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Faktor Penghambat	22
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan	23
B. Saran – Saran	23
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, khususnya pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026.
2. untuk mengevaluasi kegiatan yang tidak memenuhi target terhadap hasil yang direncanakan.
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026.
4. Menemukan alternatif pemecahan masalah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026.
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser yang akan dilaksanakan pada triwulan atau semester berikutnya.
3. Untuk memastikan bahwa indikator kinerja kegiatan dan penyerapan anggaran kegiatan Renja dapat dicapai dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
4. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Renja selanjutnya.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser adalah:

1) Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

2) Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

1. Penyusunan perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
2. Penetapan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan, kelembagaan, tatalaksanaan dan aparatur Pemerintah Daerah;
6. Pengelolaan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah;
7. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keuangan Sekretariat Daerah;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser terdiri dari:

- a. *Sekretaris Daerah;*
- b. *Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi :*
 1. *Bagian Tata Pemerintahan*
 2. *Bagian Kesejahteraan Rakyat*
 3. *Bagian Hukum*
 4. *Bagian Kerja Sama*
- c. *Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang membawahi :*
 1. *Bagian Perekonomian*
 2. *Bagian Administrasi Pembangunan*
 3. *Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*
 4. *Bagian Sumber Daya Alam*

d. Asisten Administrasi Umum yang membawahi :

1. Bagian Umum
2. Bagian Organisasi
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASERP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASERP

ANDI AZIS
NIP 19680816 199603 1 007

BUPATI PASER,

ttd

FAMI FADLI

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan *perumusan perencanaan yang berkualitas*. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Paser yang membantu Kepala Daerah menjalankan tugas dan fungsinya dalam *Penunjang Urusan Pemerintahan*.

Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, dan akar masalah, serta hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

Tabel I
Tabel Permasalahan

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
A	Bagian Organisasi		
1	Masihnya belum optimalnya kualitas layanan yang merata serta masih minimnya inovasi publik .	Pelayanan publik belum terstandar secara optimal dan belum sepenuhnya focus pada tingkat kepuasan masyarakat	1. Belum semua perangkat daerah memiliki SP sesuai kebutuhan organisasi dan dijalankan secara konsisten 2. Pengukuran kepuasan masyarakat masih terbatas dan belum menjadi bahan utama perbaikan layblik 3. Masih rendahnya inovasi layblik dilevel perangkat daerah

2	Masih belum optimalnya implementasi SAKIP di tingkat Perangkat Daerah maupun Perangkat Daerah	Manajemen Kinerja Sistem Akutabilitas Kinerja baik aspek perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja belum terbangun secara optimal	1. Masih terdapat pada sebagian perangkat daerah perencanaannya masih belum berorientasi hasil 2. Masih terdapat indikator kinerja yang kurang spesifik dan terukur 3. Terdapat pada sebagian Pelaporan kinerja perangkat daerah belum mendalam dan belum menginformasikan kinerja yang sesungguhnya 4. Belum optimalnya perangkat daerah dalam mengevaluasi atas capaian maupun kegagalan disertai langkah perbaikan kapasitas SDM masih terbatas baik
3	Prosedur dan proses bisnis organisasi masih bersifat manual, dan belum terstandarisasi secara menyeluruh	SOP masih banyak yang belum diperbaharui, proses bisnis belum terbangun dengan baik, dan pemanfaatan teknologi informasi belum merata antar perangkat daerah	1. SOP belum sesuai kebutuhan organisasi dan belum diperbaharui secara berkala 2. Lemahnya koordinasi antar bidang dalam penyederhanaan proses bisnis pelayanan publik 3. Implementasi SPBE belum terintegrasi secara menyeluruh dan merata

4	Implementasi Birokrasi belum memberikan dampak optimal capaian indikator makro pembangunan dan perubahan budaya kerja	Reformasi birokrasi berjalan belum terkoordinasi optimal dan berkelanjutan	1. rb belum diinternalisasi sebagai transformasi, melainkan masih cenderung rutinitas administrasi 2. hasil evaluasi belum sepenuhnya dipedomani dalam perencanaan dan penganggaran 3. upaya pencapaian kinerja melalui skema kolaboratif belum optimal
5	Kelembagaan belum tertata secara optimal	Belum optimalnya penataan struktur organisasi perangkat daerah yang proporsional, adaptif serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah	1. Struktur organisasi belum sebanding dengan beban kerja actual 2. Beberapa unit kerja masih terdapat tumpang tindih fungsi 3. Belum optimal Kelembagaan penunjang dalam bentuk UPTD
		Penataan organisasi belum adaptif terhadap pendekatan birokrasi berbasis hasil	Struktur organisasi masih berorientasi pada hirarki bukan pada output kinerja
6	Masih belum optimalnya kesesuaian jumlah dan kompetensi jabatan dengan kebutuhan organisasi	Belum optimalnya analisis formasi jabatan yang berbasis tugas dan fungsi organisasi secara actual dan kebutuhan riil	1. Analisis jabatan masih belum akurat 2. Analisis beban kerja belum menyeluruh 3. Adanya kesenjangan struktur dengan ketersediaan SDM 4. Masih lemahnya koordinasi antar unit /pd terkait dalam merumuskan formasi berbasis kebutuhan nyata

			Koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan evaluasi dan pengendalian belum berjalan efektif.		
			Kapasitas SDM pelaksana di bagian Administrasi Pembangunan dalam analisis evaluasi dan pengendalian masih terbatas		
			Sistem informasi pengendalian dan evaluasi belum optimal digunakan		
			Belum adanya tim evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dari OPD terkait		
		Belum optimalnya proses pengadministrasian pembangunan dalam pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Belum adanya standar baku atau pedoman teknis evaluasi dan pelaporan pembangunan		
			Kapasitas SDM dalam evaluasi dan pelaporan pembangunan masih terbatas		
			Sistem informasi evaluasi dan pelaporan belum optimal dimanfaatkan		
			Umpan balik hasil evaluasi belum terintegrasi dalam siklus perencanaan berikutnya		
		C	Bagian Hukum		
		1	Pengelolaan Produk Hukum	Banyaknya Kebutuhan terhadap Produk hukum yang belum dapat tercukupi dan penyelesaian produk hukum selain Perda yang kurang tepat waktu	Masih rendahnya kapasitas / kompetensi sumber daya manusia aparatur Bagian Hukum khususnya Perancang Perundang-undangan. Penyusunan Produk hukum daerah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan

			perundang-undangan.
			Masih rendahnya perencanaan penyusunan produk hukum daerah sesuai kebutuhan
			Lemahnya pengumpulan / penginputan data produk hukum daerah setelah ditetapkan;
			Masih kurangnya data produk hukum daerah melalui Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)
			Pemetaan peraturan perundang-undangan daerah yang ada
		Pedampingan hukum bagi ASN dan masyarakat miskin	Pembinaan dan pendampingan hukum belum efektif
			Masih lemahnya koordinasi hukum dengan aparat hukum
			Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum
D	Bagian Kesra		
1	Pengelolaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Belum Optimalnya Pengelolaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Basis data penerima manfaat belum akurat dan mutakhir
			Koordinasi lintas OPD belum berjalan efektif
			Kapasitas SDM pelaksana program masih terbatas
			Perencanaan program tidak berbasis kebutuhan nyata
			Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial bidang keagamaan
E	Pengadaan Barang/Jasa		
1	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang belum efektif	Belum efektifnya Proses Lelang pengadaan barang dan jasa	Pelaksanaan kegiatan belum tepat waktu karena kurangnya koordinasi OPD dalam penyampaian proses pengadaan barang dan jasa

			Masih lemahnya pelaksanaan tahapan tahapan proses pengadaan barang dan jasa
		Pemenuhan kompetensi bagi JF PPBJ belum optimal	Jumlah SDM fungsional pengelola barang dan jasa masih kurang
			Belum memadainya jumlah JF pengelola pengadaan barang dan jasa
			Pemenuhan JF PPBJ hanya melalui jalur CPNS, PPPK dan perpindahan jabatan
			Belum Mengikuti sertifikasi dasar /level 1 dan sertifikasi kompetensi JF PPBJ
		Pemenuhan data Proses Pengadaan Barang dan Jasa belum memadai	Belum memadainya pemenuhan data untuk RUP, TEPR, TKDN, dan SPSE
		Belum optimalnya Pengadaan Barang & Jasa Secara Elektronik	Masih terdapat Proses Pengadaan langsung manual di luar sistem
G	Bagian Umum		
1	Pengelolaan Kebutuhan barang dan pemeliharaan	Belum optimalnya perencanaan kebutuhan barang, dan rencana pemeliharaan barang di Sekretariat Daerah	Kurangnya pembinaan analisis perencanaan barang di Sekretariat Daerah
			Belum tersedianya database BMD yang memadai dan terintegrasi
			Manajemen asset di lingkup Setda belum tertata dengan baik
2	Dukungan Teknis dan Pelayanan Umum	Belum optimalnya dukungan teknis dan pelayanan umum	Pelaksanaan SOP masih belum optimal
			Dukungan budaya kerja dalam hal sense of belong belum memadai
			Masih rendahnya kualitas layanan persuratan
			Masih belum optimalnya sistem manajemen kepegawaian sekretariat daerah
			Masih lemahnya

			koordinasi antar Bagian dalam dukungan layanan umum bagi kegiatan pimpinan daerah
H	Bagian protokol dan Komunikasi Pimpinan		
1	Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Belum optimalnya kualitas layanan keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi pimpinan daerah	Pelaksanaan Keprotokolan belum sepenuhnya berdasarkan SOP dan standar pelayanan Responsifitas isu publik yang berkaitan dengan pimpinan daerah masih belum optimal Kapasitas SDM dalam pelaksanaan protokoler dan komunikasi pimpinan masih terbatas pimpinan masih terbatas Masih lemahnya koordinasi dan kerjasama antar bagian dan OPD dalam penyediaan data sebagai bahan bagi pimpinan Masih belum tertatanya dokumentasi dan inventarisasi data dan informasi pimpinan
I	Bagian kerjasama		
1	Belum efektifnya kerjasama daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah	Masih lemahnya koordinasi dan kerjasama antar daerah	Kemampuan SDM Kurang memadai Masih lemahnya pemahaman tentang kerjasama daerah oleh OPD Masih sedikitnya nota kerjasama yang telah disepakati untuk ditindalanjuti Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi dan pusat dan daerah dalam kerjasama luar negeri Masih rendahnya kualitas evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kerjasama
J	Bagian Perekonomian		

1	koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi bidang perekonomian daerah belum berjalan efektif.	Belum optimalnya fasilitasi dan layanan administratif bidang perekonomian dalam mendorong ekonomi daerah pertumbuhan	Belum optimalnya SDM di bagian ekonomi dalam menghasilkan perumusan kebijakan dan analisis ekonomi daerah
			Belum optimalnya pengkoordinasian lintas perangkat daerah terkait bidang perekonomian
			Belum efektifnya pengelolaan data bidang perekonomian
			Belum teridentifikasinya dan inventarisasi potensi perekonomian daerah
			Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan Bidang Perekonomian
K	Bagian Sumber Daya Alam		
1	pengelolaan Sumber daya Alam berkelanjutan	Belum optimalnya efektifitas pemantauan pengelolaan Sumber Daya berkelanjutan	Belum optimalnya koordinasi perangkat daerah yang terkait pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan
			Kurangnya data yang akurat dan komprehensif tentang SDA
			Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan lingkungan hidup, energi dan air
			Belum optimalnya perumusan kebijakan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
			Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan SDA berkelanjutan
			Kurangnya SDM yang berkompeten
L	Bagian Perencanaan dan Keuangan		
1	Perencanaan dan anggaran sekretariat daerah belum sepenuhnya berbasis kinerja	Kualitas dokumen perencanaan masih belum optimal	Kapasitas SDM dalam penyusunan perencanaan masih terbatas

			Masih lemahnya koordinasi antar bagian dalam penyusunan dokumen perencanaan
			Masih lemahnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan di SETDA
		Efisiensi dan efektif pengelolaan anggaran belum optimal	efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran masing masing bagian belum optimal
			Ketepatan dalam pemenuhan data dukung kelengkapan atas pelaksanaan anggaran belum memadai

D. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (UNRESOLVED MATTERS) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang. Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, telaahan Daerah Nomor 09 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Paser dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagai berikut:

ISU ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Dalam menjalankan tugas fungsinya masih Menghadapi permasalahan yang bersifat strategis/isu Strategis yaitu Belum Optimalnya Pelaksanaan Fungsi Sekretariat Daerah dalam Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Koordinasi Kebijakan, Fasilitasi Administratif, dan Layanan Dukungan terhadap Kepala Daerah dengan beberapa kondisi yaitu:

- Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan akuntabel
- Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Evaluasi Renja Triwulan II Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 disusun sebagai berikut :

Kata

Pengantar;

Daftar Isi;

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Internal Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Capaian Target Penyerapan Anggaran Kegiatan

Menjelaskan tentang Capaian target kinerja penyerapan APBD Pada lingkup Sekretariat kabupaten paser;

Bab III Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Menjelaskan tentang hasil Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja Setda Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2026 terhadap Hasil kinerja perangkat daerah dan hambatan/kendala dalam pencapaian target kerja yang telah ditetapkan.

Bab IV Penutup

Menjelaskan Kesimpulan dan Saran.

BAB II**CAPAIAN TARGET PENYERAPAN ANGGARAN KEGIATAN****A. Anggaran Belanja Kegiatan**

Belanja daerah tahun anggaran 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebesar Rp. 142.454.628.230,-.

Tabel 2.1
Uraian Anggaran Belanja Kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Paser

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4
	SEKRETARIAT DAERAH		142.454.628.230
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		31.653.188.748
		1 Administrasi Tata Pemerintahan	2.394.244.229
		2 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.400.579.178
		3 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	27.651.572.412
		4 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	206.792.929
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		2.100.782.077
		1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.410.444.092
		2 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	184.218.222
		3 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	180.586.613
		4 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	325.533.150
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		108.700.657.405
		1 Penataan Organisasi	456.871.752
		2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	746.518.220
		3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.625.632.904
		4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.983.858.952
		5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.810.360.740
		6 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.188.136.000
		7 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	5.730.577.972
		8 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.994.394.698
		9 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	518.432.991
		10 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.645.873.176

B. REALISASI ANGGARAN

Pada triwulan II Tahun 2026 pagu anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Paser mengalami efisiensi dari yang sebelumnya **Rp. 143.362.628.230,-** menjadi **Rp. 142.454.628.230,-** . Adapun realisasi anggaran sampai triwulan II ini sebesar **Rp. 53.989.661.615** atau sebesar **37,9%** dan sisa anggaran yang dapat dikelola untuk periode selanjutnya adalah sebesar **Rp. 88.464.966.615,-**.

Penyerapan anggaran pada triwulan II ini sebesar 37,9% dan belum mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar 50% dari anggaran yang tersedia. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak terealisasi di triwulan ini dikarenakan terjadinya efisiensi dan adapula kegiatan yang dilaksanakan di triwulan selanjutnya atau di akhir tahun, sehingga anggaran yang tersedia tidak dapat terserap untuk kegiatan tersebut. Adapun rincian realisasi anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Triwulan II Tahun 2026 dengan rincian belanja sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
Triwulan I Tahun Anggaran 2026**

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2025	REALISASI S/D TRIWULAN II KEUANGAN 2026	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN
	Sekretariat Daerah	Rp 142.454.628.230	Rp 53.989.661.615	37,9%	Rp 88.464.966.615
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 1.410.444.092	Rp 172.949.080	12,3%	Rp 1.237.495.012
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp 184.218.222	Rp 110.796.905	60,1%	Rp 73.421.317
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp 180.586.613	Rp 58.083.189	32,2%	Rp 122.503.424
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp 325.533.150	Rp 73.732.315	22,6%	Rp 251.800.835
	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp 2.394.244.229	Rp 918.472.475	38,4%	Rp 1.475.771.754
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp 1.400.579.178	Rp 470.128.336	33,6%	Rp 930.450.842
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp 27.651.572.412	Rp 8.417.419.520	30,4%	Rp 19.234.152.892
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp 206.792.929	Rp 55.062.632	26,6%	Rp 151.730.297
	Penataan Organisasi	Rp 456.871.752	Rp 113.629.893	24,9%	Rp 343.241.859
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 746.518.220	Rp 121.488.050	16,3%	Rp 625.030.170
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 15.625.632.904	Rp 5.371.531.252	34,4%	Rp 10.254.101.652
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 29.983.858.952	Rp 8.979.018.488	29,9%	Rp 21.004.840.464
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 6.810.360.740	Rp 2.533.334.100	37,2%	Rp 4.227.026.640
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp 5.730.577.972	Rp 1.692.804.160	29,5%	Rp 4.037.773.812
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 2.188.136.000	Rp 378.019.521	39,8%	Rp 1.810.116.479
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp 3.994.394.698	Rp 1.217.916.987	30,5%	Rp 2.776.477.711
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Rp 518.432.991	Rp 208.218.046	40,2%	Rp 310.214.945

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2025	REALISASI S/D TRIWULAN II KEUANGAN 2026	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN
	Kinerja Perangkat Daerah				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 42.645.873.176	Rp 23.097.056.666	54,2%	Rp 19.548.816.510

BAB III

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab IV mengenai rencana kinerja tahun 2026.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, sebagian besar menggunakan rumus:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100 \%$$

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2026 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur data kinerja dari seluruh bagian yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja Untuk Triwulan I

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 50\%$	Berhasil	Hijau
2	$20\% < 25\%$	Cukup Berhasil	Biru
3	$15\% < 20\%$	Kurang Berhasil	Kuning
4	$< 15\%$	Tidak Berhasil	Merah

1. REALISASI KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 - 2029, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026. Sekretariat Daerah, Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2026 indikator kinerja sasaran kegiatan beserta targetnya dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DAERAH

NO	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen 2. Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah	85 % 80 %
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase temuan ditindaklanjuti 2. Persentase LHP nihil	85 % 20 %
3	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketepatan waktu pengelolaan administrasi	90 %
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	90 %

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	85 %
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	85 %
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	75 %
8	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	85 %
9	Penataan Organisasi	Persentase efektifitas tatakelola organisasi perangkat daerah	100 %
10	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang terlaksana sesuai rencana	85 %
11	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah	100 %
12	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kebijakan kesejahteraan rakyat sesuai rencana kerja	80 %
13	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana sesuai rencana	85 %
14	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50 %
15	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Persentase Aktifitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ 3. Tingkat Kematangan UKPBJ	70 % 5,5 40
16	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pelaksanaan program/kegiatan kebijakan perekonomian sesuai rencana	85 %
17	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase laporan monitoring pembangunan yang disusun tepat waktu	100 %
18	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya ALam Yang Disusun	100 %

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh *Sekretariat Daerah Kabupaten Paser* dilakukan berdasarkan indikatifnya yaitu nilai Kinerja Sekretariat Daerah dan nilai LPPD. Kemudian untuk program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilannya dapat dilihat dari capaian realisasinya yang dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja dan Anggaran S/D Triwulan II Tahun Anggaran 2026

Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu Anggaran 2026		Realisasi Target Kinerja dan Pagu Anggaran Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2026		SISA ANGGARAN
			Klnerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
Sekretariat Daerah			100%	142.454.628.230	42,78%	53.989.661.615	42,78%	37,9%	88.464.966.615
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	2.100.782.077		415.561.489		19,78%	1.685.220.588
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Persentase Aktifitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	70%	1.410.444.092		172.949.080		12,3%	1.237.495.012
		2. Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	5,5						
		3. Tingkat Kematangan UKPBJ	40						
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pelaksanaan program/kegiatan kebijakan perekonomian sesuai rencana	85	184.218.222		110.796.905		60,1%	73.421.317
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase laporan monitoring pembangunan yang disusun tepat waktu	100	180.586.613		58.083.189		32,2%	122.503.424
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber	100	325.533.150		73.732.315		22,6%	251.800.835

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu Anggaran 2026		Realisasi Target Kinerja dan Pagu Anggaran Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2026		SISA ANGGARAN
			Klnerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Daya Alam Yang Disusun							
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tingkat Kinerja Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	31.653.188.748		9.861.082.963		31,15%	21.792.105.785
	Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi	100	2.394.244.229		918.472.475		38,4%	1.475.771.754
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi	85	1.400.579.178		470.128.336		33,6%	930.450.842
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan	80	27.651.572.412		8.417.419.520		30,4%	19.234.152.892
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Cakupan Kerjasama Daerah	50	206.792.929		55.062.632		26,6%	151.730.297
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Kinerja Manajemen Internal	70	108.700.657.405		43.713.017.163		40,32%	64.987.640.242
	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	100	456.871.752		113.629.893		24,9%	343.241.859
	Administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi Umum	90	746.518.220		121.488.050		16,3%	625.030.170

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu Anggaran 2026		Realisasi Target Kinerja dan Pagu Anggaran Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2026		SISA ANGGARAN
			Klnerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah yang terpenuhi							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	85	15.625.632.904		5.371.531.252		34,4%	10.254.101.652
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	85	29.983.858.952		8.979.018.488		29,9%	21.004.840.464
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	75	6.810.360.740		2.533.334.100		37,2%	4.277.026.640
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi	85	5.730.577.972		1.692.804.160		29,5%	4.037.773.812
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang difasilitasi	90	2.188.136.000		378.019.521		39,8%	1.810.116.479
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	85	3.994.394.698		1.217.916.987		30,5%	2.776.477.711

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu Anggaran 2026		Realisasi Target Kinerja dan Pagu Anggaran Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2026		SISA ANGGARAN
			Klnerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat	85	518.432.991		208.218.046		40,2%	310.214.945
		2. Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah	80						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase temuan ditindaklanjuti	85	42.645.873.176		23.097.056.666		54,2%	19.548.816.510
		2. Persentase LHP nihil	20						

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi kinerja sebagaimana tersaji pada table 3.3 dimana untuk sementara perhitungannya diambil dari rata-rata capaian kinerja kegiatan dan untuk sumber capaian kinerja kegiatan diambil dari rata-rata tingkat realisasi kinerja sub kegiatan dapat dinyatakan bahwa capaian realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Triwulan II Tahun 2026 dinyatakan **“Berhasil”** dengan nilai capaian realisasi kinerja sebesar **42,78%**.

B. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

Hambatan dan kendala dalam capaian target kinerja yang telah ditetapkan

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam hal pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 terdapat beberapa factor pendorong dan hambatan yang mempengaruhi pencapaian target tersebut. Adapun faktor pendorongnya adalah sebagai berikut :

- a. Komitmen Pimpinan : Adanya pengawasan dan pengendalian internal kepada seluruh ASN dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dari Sekretariat Daerah.
- b. Koordinasi yang solid : keberhasilan Sub Bagian yang realisasinya 50% atau lebih menunjukkan komitmen yang kuat sebagai ASN dalam bekerja secara profesional dan bertanggung jawab serta mampu bersinergi dalam team maupun antar bagian sesuai dengan target kinerja yang akan dicapai.
- c. Digitalisasi Administrasi : penggunaan sistem informasi dalam layanan administrasi umum mendorong peningkatan indeks kepuasan karena proses menjadi lebih cepat dan transparan.

Sedangkan faktor penghambat adalah sebagai berikut :

- a. Adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan di akhir tahun atau periode triwulan selanjutnya.
- b. Kekurangan SDM yang memadai dan berkompeten sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tertangani dengan baik .
- c. Alokasi anggaran yang belum sesuai karena adanya efisiensi

- d. Adanya kendala teknis dan panjangnya proses administrasi sehingga rekanan atau pihak penyedia terlambat dalam memenuhi persediaan barang dan jasa
- e. Kepala Bagian belum memahami formulasi perhitungan indikator kinerjanya sehingga tidak dapat menghitung capaian realisasi kinerja untuk kegiatan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Paser, untuk sumber data yang digunakan dalam perhitungan capaian kinerja menggunakan Sasaran yang terdapat pada Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2026, Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser 2025 – 2029.

Dari hasil analisis capaian kinerja, Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Triwulan II tahun 2026 terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2026 menunjukkan bahwa capaian pada sasaran strategis kegiatan berada pada kategori **Berhasil dengan** nilai rata – rata **42,78%**.
2. Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar **Rp.53.989.661.615,- atau sebesar 37,9%** dengan Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebesar **Rp. 142.454.628.230,-**. Dengan demikian dapat dikatakan pada **Triwulan II Tahun Anggaran 2026 terdapat sisa pagu anggaran pada** Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebesar **Rp. 88.464.966.615 -**.
3. Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026 masih ditemukan beberapa kendala yang menjadi penghambat capaian realisasi Program dan Kegiatan, namun demikian secara umum Program dan Kegiatan berhasil dilaksanakan sebagaimana mestinya.

B. SARAN-SARAN

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi serta mengacu pada hasil pelaksanaan evaluasi dan analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran, maka disampaikan beberapa saran sebagai alternatif solusi sebagai berikut :

1. Komitmen seluruh stakeholder untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja pada Sekretariat Daerah
2. Menggunakan waktu dan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien agar dapat diselesaikan sesuai jadwal pelaksanaannya.
3. Melaksanakan koordinasi dan membarikan surat teguran kepada penyedia atau rekanan yang terlambat dalam menyediakan barang dan jasa serta memperpendek alur pengadaan agar barang dan jasa yang dibutuhkan segera tersedia
4. Mengagendakan kegiatan sosialisasi penghitungan formulasi indikator kinerja kegiatan.

LAMPIRAN

Formulir E.31 Sistem Tertutup Hasil Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Revisi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Periode Pelaksanaan 2025																										
No.	Sarana	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Realisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Revisi Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)				Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang direvisasi				Realisasi Kinerja Pada Tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang direvisasi 2025				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Revisi Perangkat Daerah tahun 2025 (%)	Unit Pengukuran dan Perangkat Daerah
					K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp			
					E	Pg	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
1	Meningkatkan Efektivitas Kerja & Layanan Sekretariat daerah	PROGRAM PEMBIYARAN SUSUKAN PEMERINTAHAN DAERAH	Misi Kinerja Manajemen Internal	90	225,411,528,360	0	Rp0	78	Rp393,760,517,499	0	Rp	16,821,199,526	0	Rp	32,891,915,549	0	Rp	43,713,817,363	0	Rp	63,715,917,363	0.00%	19.39%			
		PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Pencapaian target dan pelaksanaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	90	5,647,846,828	0	Rp	-	95	Rp	518,422,301	20	Rp	82,438,790	30	Rp	124,787,348	100	Rp	200,238,046	100.00	Rp	200,238,046	100.00%	1.60%	
			Pencapaian target dan pelaksanaan data kinerja perangkat daerah	90				90			0		0		90		90.00			94.74%						
		Pengelolaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	3,047,082,908	-		0	Rp	281,071,876	2	Rp	93,239,200	2	Rp	30,907,070	4	Rp	97,083,276	4	Rp	97,083,276	66.67%	2.80%		
		Kendala dan Pengawasan Dokumen RUP/RPD	Jumlah Dokumen RUP/RPD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Perangkat Daerah	1	370,698,908	-		10	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	-	Rp	-	0.00%	0.00%					
		Kendala dan Pengawasan Capaian Kinerja dan Monev Realisasi Kinerja RPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Monev Realisasi Kinerja RPD dan Laporan Monev dan Pengawasan Laporan Capaian Kinerja dan Monev	0	112,994,490	-		0	Rp	95,342,701	2	Rp	9,390,000	3	Rp	9,094,701	3	Rp	9,094,701	75.00%	2.20%					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	580,080,000	-		0	Rp	113,496,200	1	Rp	30,902,500	1	Rp	40,947,000	2	Rp	18,027,500	2	Rp	18,027,500	60.00%	0.40%		
		Pengelolaan Dokumen Perencanaan dan Monev Realisasi Kinerja RPD dan Monev	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Realisasi Kinerja RPD dan Monev	10	112,994,490	-		0	Rp	40,210,402	3	Rp	-	0	Rp	18,000,000	3	Rp	18,000,000	75.00%	4.00%					
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT	Pencapaian target dan pelaksanaan LRP	90	225,500,571,474	-	Rp	-	95	Rp	42,645,873,376	0	Rp	4,407,675,391	0	Rp	13,400,305,275	0	Rp	23,097,896,646	0.00%	10.99%				
			Pencapaian LRP	40				20			0		2		0											
		Pengelolaan Anggaran RPD	Jumlah Anggaran RPD dan Anggaran RPD	1219	204,710,445,276	-		420	Rp	43,028,082,871	90	Rp	4,627,074,891	80	Rp	10,252,297,196	200	Rp	12,475,096,794	200	Rp	12,475,096,794	91.63%	10.91%		
		Kendala dan Pengawasan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	0	1,048,809,000	-		10	Rp	1,170,910,000	1	Rp	-	0	Rp	40,000,000	0	Rp	30,910,000	0	Rp	30,910,000	0.00%	0.00%		
		Kendala dan Pengawasan Laporan Keuangan dan Monev Realisasi Kinerja RPD	Jumlah Laporan Keuangan dan Monev Realisasi Kinerja RPD dan Monev	1	325,102,000	-		0	Rp	8,096,120	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0.00%	0.00%					
		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Pencapaian target dan pelaksanaan Monev Realisasi Kinerja RPD dan Monev	90	11,600,600,000	-	Rp	-	90	Rp	2,199,326,800	0	Rp	22,255,390	0	Rp	349,763,522	0	Rp	378,809,521	0.00%	2.28%				
			Pencapaian target dan pelaksanaan Monev Realisasi Kinerja RPD dan Monev	30	1,000,000,000	-		20	Rp	100,000,000	0	Rp	12,000,000	0	Rp	30,000,000	10	Rp	60,000,000	10.00%	0.90%					
		Pengelolaan Anggaran RPD dan Monev Realisasi Kinerja RPD dan Monev	Jumlah Anggaran RPD dan Monev Realisasi Kinerja RPD dan Monev	2	5,000,000,000	-		10	Rp	800,000,000	1	Rp	-	0	Rp	40,000,000	2	Rp	80,000,000	10.00%	1.00%					
		Pengelolaan Anggaran RPD dan Monev Realisasi Kinerja RPD dan Monev	Jumlah Anggaran RPD dan Monev Realisasi Kinerja RPD dan Monev	0	1,000,000,000	-		0	Rp	100,000,000	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0.00%	0.00%					
		Pengelolaan Anggaran RPD dan Monev Realisasi Kinerja RPD dan Monev	Jumlah Anggaran RPD dan Monev Realisasi Kinerja RPD dan Monev	30	3,000,000,000	-		20	Rp	300,000,000	0	Rp	30,000,000	0	Rp	30,000,000	0	Rp	30,000,000	33.33%	2.90%					

Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	90	3,093,000,000	-	Rp	-	90	Rp	746,518,220	0	Rp	1,346,481,780	0	Rp	70,478,250	0	Rp	121,400,850	0	Rp	121,400,850	0.00%	3.32%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	11	1,005,000,000	-	Rp	-	11	Rp	490,547,500	0	Rp	514,452,500	0	Rp	70,478,250	0	Rp	514,452,500	0	Rp	514,452,500	0.00%	0.88%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	300	3,093,000,000	-	Rp	-	300	Rp	2,093,452,780	0	Rp	1,099,547,220	0	Rp	70,478,250	0	Rp	1,099,547,220	0	Rp	1,099,547,220	0.00%	3.32%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	90	3,093,000,000	-	Rp	-	90	Rp	1,628,632,500	0	Rp	1,464,367,500	0	Rp	3,616,540,800	0	Rp	5,371,551,250	0	Rp	5,371,551,250	0.00%	0.83%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	1	420,000,000	-	Rp	-	1	Rp	190,130,000	0	Rp	229,870,000	0	Rp	30,740,000	0	Rp	229,870,000	0	Rp	229,870,000	0.00%	0.40%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	1	420,000,000	-	Rp	-	1	Rp	4,390,000,000	0	Rp	780,000,000	0	Rp	1,340,000,000	0	Rp	2,800,000,000	0	Rp	2,800,000,000	0.00%	0.87%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	4	1,680,000,000	-	Rp	-	4	Rp	1,030,000,000	0	Rp	650,000,000	0	Rp	1,680,000	0	Rp	1,680,000	0	Rp	1,680,000	0.00%	0.16%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	1	1,000,000,000	-	Rp	-	1	Rp	1,000,000,000	0	Rp	1,000,000,000	0	Rp	1,000,000,000	0	Rp	1,000,000,000	0	Rp	1,000,000,000	0.00%	0.33%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	4	4,000,000,000	-	Rp	-	4	Rp	4,000,000,000	0	Rp	4,000,000,000	0	Rp	4,000,000,000	0	Rp	4,000,000,000	0	Rp	4,000,000,000	0.00%	0.37%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%
Administrasi Ekspedisi Persepatif Daerah	Persepatif Administrasi dan Ekspedisi yang Terintegrasi	10	10,000,000,000	-	Rp	-	10	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0	Rp	10,000,000,000	0.00%	1.00%

2	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kinerja dan Responsivitas	Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Daerah (RKPD)	35	107,648,249	-	-	-	4	Rp	38,889,080	1	Rp	-	1	Rp	8,444,080	2	Rp	8,444,080	3	Rp	8,444,080	3,57%	1,86%	Bagian Protokol
		Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Tindakan Pelaksanaan Publik & Tata Kelola	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Tindakan Pelaksanaan Publik dan Tata Kelola	34	385,035,800	-	-	-	4	Rp	25,800,080	1	Rp	670,000	1	Rp	4,540,080	2	Rp	5,190,080	2	Rp	5,190,080	5,00%	1,00%	
		Pengelolaan dan Pengembangan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan dan Pengembangan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	40	106,022,344	-	-	-	2	Rp	30,394,080	4	Rp	20,024,760	0	Rp	-	4	Rp	20,024,760	4	Rp	20,024,760	5,00%	1,97%	
		PELAKSANAAN PROSEDUR DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Persentase kegiatan prosedural dan komunikasi pimpinan yang terdokumen sesuai	95	21,445,521,449	0	Rp	-	95	Rp	3,394,394,888	0	Rp	768,684,787	0	Rp	457,232,789	0	Rp	1,217,316,987	0	Rp	1,217,316,987	0,00%	0,07%	
		Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Kelembagaan yang terdokumen	12	30,494,027,828	-	-	-	12	Rp	180,000,000	0	Rp	80,747,360	0	Rp	376,800,000	0	Rp	430,790,360	1	Rp	430,790,360	25,00%	4,07%	
		Fasilitasi Komunikasi Masyarakat	Jumlah Komunikasi Masyarakat yang terdokumen	10	5,494,000,128	-	-	-	10	Rp	124,027,664	0	Rp	25,240,000	0	Rp	18,300,000	0	Rp	34,904,000	0	Rp	34,904,000	20,00%	0,00%	
		Pengelolaan dan Pengembangan Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja yang terdokumen	12	5,479,000,000	-	-	-	12	Rp	102,800,224	0	Rp	380,800,707	0	Rp	70,020,000	0	Rp	408,850,707	0	Rp	408,850,707	50,00%	0,00%	
		PROSEDUR PEMERINTAHAN DAN KESEKUTERAAN ADMINISTRASI	Tingkat Kinerja pelayanan dan keajaiberaan	95	184,491,289,383	96	Rp	90	Rp	31,953,388,748	0	Rp	1,872,372,840	0	Rp	7,388,718,923	0	Rp	3,661,662,963	104,37	Rp	3,661,662,963	100,00%	0,45%		
		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Laporan Administrasi	100	8,311,558,366	0	Rp	-	100	Rp	2,334,244,229	0	Rp	636,886,718	0	Rp	382,395,767	0	Rp	598,472,475	0	Rp	598,472,475	0,00%	0,00%	
		Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	0	6,440,000,000	-	-	-	0	Rp	37,847,610	1	Rp	35,027,760	0	Rp	50,440,000	4	Rp	82,504,540	0	Rp	82,504,540	3,00%	4,70%	
		Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan	0	6,910,000,000	-	-	-	0	Rp	400,000,000	1	Rp	55,660,000	1	Rp	90,500,000	2	Rp	100,000,000	0	Rp	100,000,000	1,00%	0,30%	
		Fasilitasi Pelaksanaan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Daerah	0	2,770,794,000	-	-	-	0	Rp	100,027,020	0	Rp	417,240,000	0	Rp	10,444,597	0	Rp	58,706,000	0	Rp	58,706,000	0,00%	0,04%	
		Fasilitasi dan Koordinasi Hubungan	Persentase kegiatan fasilitasi dan koordinasi hubungan yang terdokumen	95	4,558,848,845	0	Rp	-	95	Rp	1,466,575,178	0	Rp	324,488,390	0	Rp	145,713,340	0	Rp	470,126,238	0	Rp	470,126,238	0,00%	0,02%	
		Fasilitasi Pelayanan Publik	Jumlah Publikasi Pelayanan Publik	0	102,000,799	-	-	-	0	Rp	100,202,000	201	Rp	44,894,200	200	Rp	-	401	Rp	44,894,200	401	Rp	44,894,200	91,20%	2,96%	
		Fasilitasi Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan Pelayanan Publik	0	2,340,000,700	-	-	-	0	Rp	800,000,000	1	Rp	270,000,000	2	Rp	10,300,000	3	Rp	400,000,000	1	Rp	400,000,000	10,00%	0,04%	
		Pengelolaan dan Pengembangan Hubungan dan Pengkaderan	Jumlah Publikasi Hubungan dan Pengembangan Hubungan yang terdokumen	0	99,000,000	-	-	-	0	Rp	10,000,000	221	Rp	-	220	Rp	6,700,000	441	Rp	6,700,000	441	Rp	6,700,000	20,00%	1,00%	
		Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan	Persentase pelaksanaan kebijakan yang terdokumen	100	84,340,262,838	0	Rp	-	99	Rp	27,651,572,442	0	Rp	886,883,588	0	Rp	7,521,436,800	0	Rp	9,417,418,528	0	Rp	9,417,418,528	0,00%	0,02%	
		Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan	0	10,474,408,244	-	-	-	0	Rp	14,700,000,000	101	Rp	890,000,180	100	Rp	7,389,000,000	201	Rp	6,218,000,000	201	Rp	6,218,000,000	276,04%	30,00%	
		Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan	0	7,907,000,000	-	-	-	0	Rp	2,720,000,000	20	Rp	24,700,000	20	Rp	10,000,000	40	Rp	80,000,000	40	Rp	80,000,000	10,00%	3,00%	
Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan	0	1,217,000,000	-	-	-	0	Rp	99,000,000	3	Rp	9,000,000	4	Rp	1,040,000	7	Rp	12,420,000	7	Rp	12,420,000	20,00%	0,00%			
Fasilitasi Kelembagaan Daerah	Persentase lembaga yang terdokumen dan difasilitasi dan difasilitasi	99	2,392,547,345	0	Rp	-	99	Rp	286,792,829	0	Rp	46,872,632	0	Rp	9,390,800	0	Rp	95,962,632	0	Rp	95,962,632	0,00%	2,00%			
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Reger	Jumlah Kerja Sama yang terdokumen	25	144,000,000	-	-	-	25	Rp	10,000,000	0	Rp	10,000,000	4	Rp	100,000	0	Rp	10,000,000	0	Rp	10,000,000	40,00%	1,00%			
Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang terdokumen	0	140,000,000	-	-	-	0	Rp	10,000,000	0	Rp	10,000,000	1	Rp	1,000,000	4	Rp	10,000,000	0	Rp	10,000,000	50,00%	4,57%			

3	Meningkatkan Koordinasi Kebijakan daerah Disdag/Provinsi dan Pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat dan Jenis Kegiatan	25	24.749.743,187	0		Rp0	100	Rp2.993.782.877	0	Rp154.939.894	0	Rp229.561.595	0	Rp	416.561.499	0	Rp	476.561.499	0.00%	1.60%	Bagian Pengada n Barang dan Jasa		
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	aktivitas pengelaaan pengadaan barang dan jasa secara Kredifit dan Kompetitif SDM Tingkat Kesetaraan	98	12.779.593,838	0	Rp	70	Rp	1.419.444.852	0	Rp65.774.000	0	Rp	117.178.000	0	Rp	172.949.000	0	Rp	172.949.000	0.00%		1.30%	
				7,5				1,5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				43				40		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan	0	3.065.432,39	-		10	Rp	217.966,091	0	Rp	90.719.000	0	Rp	17.382.000	0	Rp	71.239.000	0	Rp	71.239.000		19.00%	1.00%
		Pengelolaan Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Laporan Pengadaan Secara Elektronik	0	8.570.898,594	-		10	Rp	930.872.000	0	Rp	-	0	Rp	32.000.000	0	Rp	32.000.000	0	Rp	32.000.000		10.00%	0.00%
		Pembinaan dan Admisi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Admisi Pengadaan Barang dan	20	3.038.179,108	-		20	Rp	642.309.000	0	Rp	-	0	Rp	61.764.000	0	Rp	61.764.000	0	Rp	61.764.000		3.00%	1.00%
		Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan	Percentage pelaksanaan program/kegiatan kebijakan	95	4.795.646,746	0	Rp	-	85	Rp	194.210.222	25	Rp43.243.305	0	Rp	27.532.600	25	Rp	106.716.595	25	Rp	106.716.595		26.32%	2.33%
		Kendaraan, kendaraan dan alat angkut	Jumlah Dokumen Hasil Kendaraan, kendaraan, dan alat angkut	10	1.182.750,179	-		10	Rp	6.698.000	0	Rp6.676.000	0	Rp	9.027.000	0	Rp	11.500.000	0	Rp	11.500.000	16.00%		1.00%	
		Pengelolaan dan Admisi Pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan (MPO)	0	1.194.197,375	-		10	Rp	6.698.000	0	Rp	4.194.375	0	Rp	7.094.200	0	Rp	56.362.165	0	Rp	56.362.165		19.00%	1.67%
		Pembinaan dan Pengawasan Dokumen Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Dokumen Administrasi	10	1.194.197,375	-		10	Rp	6.698.000	0	Rp	39.828.375	0	Rp	9.014.000	0	Rp	26.374.000	0	Rp	26.374.000		16.00%	2.86%
		Kendaraan, kendaraan dan alat angkut	Jumlah Dokumen Hasil Kendaraan, kendaraan, dan alat angkut	1	1.192.000.000	-		1	Rp	0	0	Rp	0	0	Rp	0	0	Rp	0	0	Rp	0		0.00%	0.00%
		Kendaraan, kendaraan dan alat angkut	Jumlah Dokumen Hasil Kendaraan, kendaraan, dan alat angkut	20	430.982.308	-		0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-		0.00%	0.00%
		Pelaksanaan Administrasi Pengadaan	Percentage pelaksanaan program/kegiatan administrasi	100	3.561.386,374	0	Rp	-	100	Rp	180.586.613	0	Rp42.887.383	0	Rp	16.336.000	0	Rp	58.843.193	0	Rp	58.843.193		0.00%	1.63%
		Pelaksanaan Program Pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Program Pengadaan	10	1.099.625,758	-		10	Rp	6.676.000	0	Rp	6.760.000	1	Rp	-	1	Rp	6.794.000	1	Rp	6.794.000		6.30%	1.29%
		Pengelolaan dan Admisi Program Pengadaan	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan dan Admisi Program Pengadaan	60	1.055.985,710	-		10	Rp	10.658.000	0	Rp	6.004.471	0	Rp	5.760.000	0	Rp	6.004.471	0	Rp	6.004.471		6.00%	0.67%
		Pengelolaan dan Admisi Program Pengadaan	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan dan Admisi Program Pengadaan	60	1.012.367,719	-		10	Rp	10.000.000	0	Rp	6.176.000	0	Rp	6.250.000	0	Rp	22.778.000	0	Rp	22.778.000		6.00%	0.76%
Pembinaan dan Admisi Program Pengadaan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Admisi Program Pengadaan	0	2.642.217,445	0	Rp	-	100	Rp	225.523.158	0	Rp42.875.400	0	Rp	59.954.595	0	Rp	73.732.215	0	Rp	73.732.215	0.00%	2.82%			
Kendaraan, kendaraan dan alat angkut	Jumlah Dokumen Hasil Kendaraan, kendaraan, dan alat angkut	6	1.065.000.000	-		6	Rp	212.004.240	4	Rp	17.010.000	0	Rp	25.234.000	0	Rp	26.894.300	0	Rp	26.894.300	16.00%	2.00%			
Kendaraan, kendaraan dan alat angkut	Jumlah Dokumen Hasil Kendaraan, kendaraan, dan alat angkut	10	1.093.500.000	-		10	Rp	56.004.000	0	Rp	31.953.000	0	Rp	9.495.000	0	Rp	21.018.760	0	Rp	21.018.760	16.00%	2.86%			
Kendaraan, kendaraan dan alat angkut	Jumlah Dokumen Hasil Kendaraan, kendaraan, dan alat angkut	10	1.180.000.000	-		10	Rp	16.300.000	0	Rp	-	0	Rp	21.117.250	0	Rp	21.117.250	0	Rp	21.117.250	16.00%	1.67%			

| Rencana capaian energi SD | | | | | | | | | | 22.72% | Rp52.888.677.543 | | | | | | | | | | 26.66% | Rp41.991.004.004 | | | | | | | | | | 42.78% | Rp | | | | | | | | | | 53.989.661.619 | </ |